

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena kemiskinan di wilayah perkotaan merupakan fenomena baru, terutama di negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Kemiskinan di wilayah perkotaan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah negara. *Asian Development Bank* menjelaskan bahwa tidak seperti kemiskinan wilayah pedesaan, kemiskinan wilayah perkotaan sangat kompleks dan multidimensional menyangkut kurangnya pendapatan untuk konsumsi sehingga kurang akses terhadap tanah dan rumah, infrastruktur fisik, sumber ekonomi dan mata pencaharian, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan (Mathur, 2013).

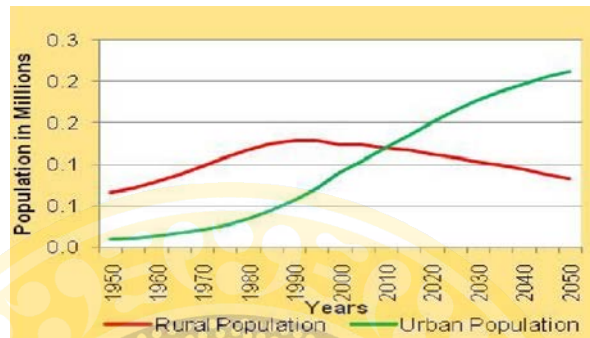
Menurut Tjiptoherijanto (1999) dalam Adam (n), wilayah perkotaan (*urban area*) tidak sama dengan kota (*city*). Wilayah perkotaan merupakan wilayah administratif setingkat desa atau kelurahan yang memiliki kepadatan penduduk lebih dari 5 000 jiwa per kilometer persegi, persentase rumah tangga pertanian kurang dari 25 persen, serta memiliki sekurang-kurangnya 8 fasilitas perkotaan seperti sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi (Habitat Nasional Indonesia, 2014). Perkembangan wilayah perkotaan di beberapa negara berkembang yang begitu pesat telah memberikan berbagai macam dampak bagi masyarakat perkotaan itu sendiri. Perkembangan ini salah satunya disebabkan karena wilayah perkotaan sebagai pusat perekonomian yang

menyebabkan daya tarik bagi masyarakat luar wilayah perkotaan untuk melakukan urbanisasi (Ardiansyah (2009).

Argumen Todaro dan Smith (2006:379-380), turut mendukung penjelasan di atas, bahwa urbanisasi akan memperburuk ketidakseimbangan antara perdesaan dan perkotaan. Hal ini setidaknya dipengaruhi oleh dua hal, yang pertama dari sisi penawaran, urbanisasi yang berlebihan dapat meningkatkan jumlah pencari kerja di perkotaan yang melampaui tingkat atau kapasitas penduduk. Kedua, dari sisi permintaan penciptaan kesempatan kerja di wilayah perkotaan lebih sulit dan jauh lebih mahal daripada di wilayah perdesaan.

Kemiskinan dapat dilihat dari berbagai karakteristik. Houghton dan Shahidur (2012:157) menentukan faktor kemiskinan menurut tiga karakteristik, yaitu karakteristik wilayah, masyarakat, serta rumah tangga dan individu. Berdasarkan karakteristik wilayah, umumnya kemiskinan terjadi di daerah-daerah yang terisolasi secara geografis, basis sumber daya rendah, serta keadaan iklim yang tidak ramah. Karakteristik masyarakat yaitu infrastruktur dengan indikator yang sering digunakan yaitu jarak dengan jalan yang diaspal, ketersediaan listrik, kedekatan dengan pasar, ketersediaan fasilitas sekolah dan fasilitas kesehatan, dan jarak ke pusat pemerintahan. Selain infrastruktur, karakteristik masyarakat diantaranya adalah rata-rata pengembangan sumber daya manusia, akses pada pekerjaan, pergerakan dan keterwakilan sosial, dan distribusi tanah. Untuk karakteristik individu dan rumah tangga, Houghton dan Shahidur membaginya dalam tiga karakteristik lagi, yaitu karakteristik demografis yang indikatornya adalah ukuran dan struktur rumah tangga, karakteristik ekonomi dengan indikator

pendapatan dan konsumsi serta kepemilikan pekerjaan dan aset yang dimiliki, karakteristik sosial dengan indikator yang paling sering digunakan yaitu kesehatan, pendidikan, dan rumah.

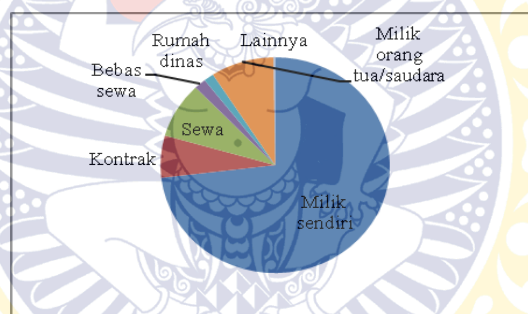


Sumber: United Nation (2012) dalam Mathur (2013)

Gambar 1.1 **Proyeksi Transisi Penduduk Wilayah Perkotaan di Indonesia 1950-2050**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat urbanisasi tinggi di Asia. Berdasarkan *World Urbanization Prospect*, penduduk wilayah perkotaan adalah 50 persen dari penduduk di Indonesia (dengan jumlah penduduk kira-kira 120 juta jiwa) pada tahun 2010. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat mendorong menurunnya kemiskinan perkapita dari 11,4 persen pada tahun 2004 menjadi 10,7 persen pada tahun 2012. Beberapa kelompok yang paling banyak mengalami status kemiskinan adalah kaum urban, tenaga kerja anak-anak, anak-anak jalanan, serta masyarakat yang hidup pada kawasan informal (Baker, 2012, dalam Mathur, 2013). Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa penduduk wilayah perkotaan meningkat tajam sejak tahun 2000, dan diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya. Hal inilah yang diduga menimbulkan lingkaran kemiskinan di wilayah perkotaan.

Salah satu kebutuhan pokok seperti yang dijelaskan Maslow (1984) dalam rejekiningsih (2007), adalah rumah. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang mempunyai fungsi strategis dalam peranannya sebagai pusat pendidikan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat melalui meningkatnya kualitas perumahan. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, menyebutkan bahwa pengertian rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

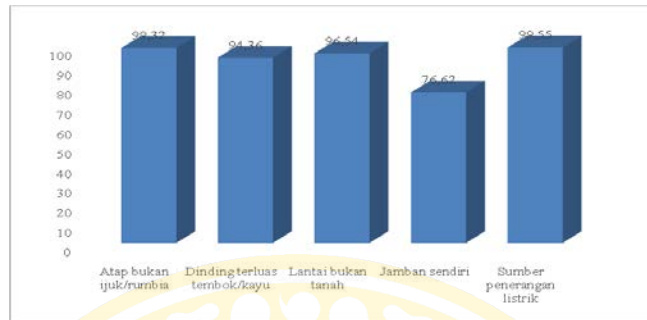


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 1.2
Rumah Perkotaan Menurut Status Kepemilikan Tahun 2012 (%)

Pada Gambar 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa persentase kepemilikan rumah di perkotaan paling tinggi berstatus milik sendiri yaitu sebesar 73,13 persen, diikuti oleh status rumah milik orang tua/saudara sebesar 8,96 persen, rumah berstatus sewa sebesar 8,34 persen, status rumah kontrak sebesar 6,29 persen, rumah berstatus bebas sewa sebesar 1,65 persen, rumah berstatus rumah dinas sebesar 1,42 persen, serta lainnya sebesar 0,21 persen. Status kepemilikan rumah

didominasi oleh status milik sendiri. Hal ini menunjukkan kemampuan masyarakat wilayah perkotaan sudah baik dalam memenuhi kebutuhan utamanya.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

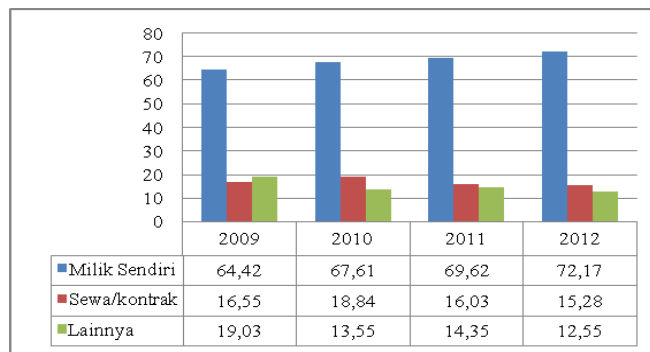
Gambar 1.3
Perumahan Layak di Wilayah Perkotaan Berdasarkan Karakteristiknya Tahun 2012 (%)

Pengaruh tersedianya fasilitas dalam rumah mempengaruhi kualitas hidup rumah tangga. Menurut Awan dan Nasir (2010), rumah tangga yang memiliki kualitas karakteristik perumahan yang baik cenderung berstatus tidak miskin dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak memilikinya. Pada Gambar 1.3 (hal. 6), dapat dilihat bahwa rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangannya adalah 99,56 persen yang berarti penggunaan listrik sebagai sumber penerangan tidak memberikan pengaruh terhadap status kemiskinan. Begitupun dengan jenis atap, jenis dinding, dan jenis lantai yang mempunyai persentase karakteristik rumah layak hampir 100 persen, yaitu masing-masing 99,31 persen, 94,39, dan 96,61 persen. Sedangkan untuk karakteristik sanitasi, luas lantai, dan sumber air minum layak masih terlihat kurang, dimana sanitasi layak sebesar 72,7 persen, luas lantai perkapita yang memenuhi standar ($>8 \text{ m}^2$) sebesar 86,16 dan sumber air minum layak hanya 38,11 persen dari seluruh rumah tangga wilayah perkotaan. Lebih lanjut Awan

dan Nasir (2010) menjelaskan bahwa rumah tangga yang mempunyai fasilitas kurang ini dapat berpengaruh terhadap status kemiskinan.

Rumah layak huni dapat dilihat dari bangunan fisiknya yang menentukan rumah tersebut aman bagi penghuninya atau dapat juga disebut dengan rumah sehat. Menurut *American Public Health Association* (2014) syarat rumah yang dapat dikatakan sehat adalah memenuhi kebutuhan fisiologis, seperti pencahayaan, penghawaan, dan ruang gerak yang cukup; memenuhi kebutuhan psikologis seperti privasi yang cukup serta komunikasi yang sehat antara anggota penghuni rumah; memenuhi persyaratan pencegahan penyakit; serta memenuhi persyaratan pencegahan kecelakaan baik yang timbul di dalam maupun di luar rumah. Sedangkan rumah tidak layak huni merupakan bangunan yang tidak mempunyai keteraturan struktur rumah, dibangun pada tanah dengan kepadatan tinggi dengan sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (UU No. 1 Tahun 2011).

Selain karakteristik perumahan yang menentukan status kemiskinan rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga juga merupakan penyebab yang signifikan terhadap status kemiskinan rumah tangga. Kualitas pendidikan akan signifikan terhadap jenis pekerjaan dan pendapatan yang akan diperoleh. Nasir dan Nazli (2000) dalam Awan dan Nasir (2010) menemukan bahwa pendapatan perbulan akan meningkat sebesar 7,3 persen berdasarkan peningkatan tahun sekolah. Oleh karena itu, pendidikan dapat mempengaruhi status kemiskinan (Awan dan Nasir, 2010).



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014

Gambar 1.4 **Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin** **di Wilayah Perkotaan Tahun 2012 (%)**

Pada tahun 2012, tingkat pendidikan kepala rumah tangga di wilayah perkotaan, kepala rumah tangga berpendidikan rendah mempunyai peluang lebih banyak untuk berstatus miskin. Pada Gambar 1.4, dapat dilihat bahwa rumah tangga miskin lebih banyak didominasi oleh kepala rumah tangga yang mempunyai pendidikan rendah (tidak tamat SD, tamat SD, tamat SMP). Hal ini menunjukkan pendidikan kepala rumah tangga merupakan komponen penting dalam investasi modal manusia yang sangat efektif untuk menurunkan status kemiskinan.

Awan dan Nasir (2010) dalam penelitiannya, meneliti tentang pendidikan, status pekerjaan, status rumah serta sarana dan prasarannya, dan tersedianya fasilitas umum yang diduga berpengaruh terhadap kemiskinan wilayah perkotaan di Pakistan. Dengan menggunakan analisis regresi logistik, variabel-variabel tersebut di analisis untuk mengetahui pengaruh signifikan penurunan status kemiskinan wilayah perkotaan di Pakistan. Perbedaan penelitian Awan dan Nasir dengan penelitian ini adalah penelitian Awan dan Nasir menggunakan variabel tersedianya fasilitas umum, sedangkan dalam penelitian ini tidak digunakan

variabel tersebut karena penyediaan fasilitas umum termasuk dalam karakteristik masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dianggap perlu dilakukan analisis mengenai Pengaruh Karakteristik Ekonomi dan Sosial Terhadap Status Kemiskinan pada Wilayah Perkotaan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah variabel karakteristik ekonomi dan sosial secara simultan berpengaruh terhadap status kemiskinan pada wilayah perkotaan di Indonesia?
- b. Apakah variabel karakteristik ekonomi dan sosial secara parsial berpengaruh terhadap status kemiskinan pada wilayah perkotaan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis pengaruh variabel karakteristik ekonomi dan sosial terhadap status kemiskinan secara simultan pada wilayah perkotaan di Indonesia.
- b. Menganalisis pengaruh variabel karakteristik ekonomi dan sosial terhadap status kemiskinan secara parsial pada wilayah perkotaan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan wawasan kepada pemerintah terkait hal-hal yang dapat mempengaruhi status keiskinan rumah tangga pada wilayah perkotaan, sehingga diharapkan pemerintah dapat mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat untuk memfasilitasi proses perbaikan status kemiskinan rumah tangga tersebut.
- b. Memberikan gambaran bagi akademisi terkait hal-hal yang dapat mempengaruhi status keiskinan rumah tangga pada wilayah perkotaan, sehingga diharapkan dapat dijadikan landasan berpikir untuk penelitian selanjutnya.
- c. Memberikan gambaran bagi masyarakat terkait hal-hal yang dapat mempengaruhi status keiskinan rumah tangga pada wilayah perkotaan, sehingga diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat agar dapat memperbaiki status ke miskinannya (bagi rumah tangga berstatus miskin) atau mencegah agar tidak menjadi miskin (bagi rumah tangga yang berstatus tidak miskin).

1.5 Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi menjadi lima bagian dimana pembahasannya saling terkait, yaitu:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bagian ini memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini memuat landasan teori, kerangka konsep, penelitian sebelumnya, serta hipotesis dan metode analisis.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat gambaran umum keiskinan dan profil kerentanan di Indonesia, deskripsi hasil uji empiris, analisis model dan pembuktian hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB 5: KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini memuat simpulan hasil penelitian yang ditarik oleh penulis dan saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA